

***Just Energy Transition* dalam Hubungan Internasional Kontemporer: Debat, Kontestasi, dan Politik Keadilan Global**

Asep Agil Supriatna^{1*}, Wildan Ilmanuarif Shafar²

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Singaperbangsa Karawang

*Email Korespondensi: 2210631260028@student.unsika.ac.id

Abstract

This article maps the Just Energy Transition (JET) debate in contemporary International Relations (IR) literature and identifies its fundamental conceptual contestations. Using qualitative document analysis combined with reflexive thematic analysis of peer-reviewed publications from 1995 to 2025, this study purposively selected literature representing diverse IR theoretical approaches and Global North-South perspectives. The analysis identifies four main themes: International Political Economy and Global Governance, Political Ecology and Energy Justice, Energy Democracy and Socio-Technical Transitions, and Public Policy and Development Studies. Their interaction produces four conceptual contestations: reform versus structural transformation, universalism versus normative particularism, speed versus inclusivity, and epistemic asymmetry between the Global North and Global South. The findings demonstrate that JET is not merely a technical policy matter but a field of global political contestation reflecting deep ontological and epistemological differences about justice, power, and world order transformation. This study contributes the first systematic conceptual mapping of JET debates from an IR lens.

Keywords: *Just Energy Transition, International Relations, Global Governance, Climate Justice*

Abstrak

Artikel ini memetakan perdebatan Just Energy Transition (JET) dalam literatur Hubungan Internasional (HI) kontemporer dan mengidentifikasi kontestasi konseptual fundamentalnya. Menggunakan analisis dokumen kualitatif dengan reflexive thematic analysis terhadap publikasi peer-reviewed periode 1995-2025, penelitian ini memilih literatur secara purposif yang merepresentasikan beragam pendekatan teoretis HI serta perspektif Global North dan Global South. Analisis mengidentifikasi empat tema utama: Ekonomi Politik Internasional dan Tata Kelola Global, Ekologi Politik dan Keadilan Energi, Demokrasi Energi dan Transisi Sosio-Teknis, serta Kebijakan Publik dan Studi Pembangunan. Interaksi antarkeempat tema menghasilkan empat kontestasi fundamental: reformasi versus transformasi struktural, universalisme versus partikularisme normatif, kecepatan versus inklusivitas, serta asimetri epistemik Global North-South. Temuan menunjukkan bahwa JET dalam perspektif HI bukan sekadar persoalan teknis-kebijakan, melainkan arena kontestasi politik global yang mencerminkan perbedaan ontologis dan epistemologis mengenai keadilan, kekuasaan, dan transformasi tatanan dunia.

Kata kunci: Just Energy Transition, Hubungan Internasional, Tata Kelola Global, Keadilan Iklim

PENDAHULUAN

Krisis iklim merupakan fenomena global yang mengancam kehidupan manusia secara menyeluruh. Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah manusia modern, dengan suhu rata-rata global mencapai 1,48°C di atas baseline pra-industri, hampir menyentuh ambang batas kritis 1,5°C yang ditetapkan oleh Paris Agreement (IPCC, 2023). Akar permasalahan terletak pada akumulasi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Sejak Revolusi Industri, konsentrasi karbon dioksida telah meningkat 50% dari 280 ppm menjadi 420 ppm akibat pembakaran bahan bakar fosil yang masih mendominasi sistem energi global. Dampak krisis iklim bersifat sistemik dan multi-dimensional, mencakup kenaikan permukaan laut, krisis pangan akibat perubahan pola curah hujan, hingga migrasi massal akibat bencana yang berkaitan dengan iklim yang menciptakan ketegangan internasional dan mempertajam ketimpangan global (Sultana, 2022). Ketegangan ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga geopolitik, di mana

perebutan sumber daya energi terbarukan dan mineral kritis kini menjadi sumber konflik baru dalam tata kelola global.

Menghadapi kompleksitas tersebut, Paris Agreement 2015 tidak hanya menetapkan target mitigasi dengan membatasi pemanasan global pada 1,5-2°C, tetapi juga secara eksplisit mengakui perlunya *just transition* yang memperhatikan keharusan transisi tenaga kerja yang adil dan penciptaan pekerjaan yang layak (UNFCCC, 2015). Pengakuan ini membuka ruang bagi diskursus akademis dan praktis mengenai *Just Energy Transition* (JET): bagaimana transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat dilakukan secara adil, inklusif, dan tidak meninggalkan komunitas rentan (Newell & Mulvaney, 2013). Dalam literatur Hubungan Internasional (HI) dan studi transisi energi, JET muncul sebagai upaya mengaitkan dekarbonisasi dengan berbagai dimensi keadilan lintas negara, kelas, dan ras. Namun, istilah “just” sendiri sangat diperdebatkan, memunculkan spektrum pemaknaan dari kompensasi ekonomi sempit sampai transformasi struktural yang radikal (Chiara et al., 2025; Shangguan et al., 2024).

Secara konseptual, terdapat kontestasi mendasar mengenai dimensi keadilan apa yang menjadi inti JET. Debat ini berkisar antara keadilan distribusional, prosedural, pengakuan, dan restoratif, hingga perluasan ke arah keadilan kosmopolitan, kognitif, dan antargenerasi (Wang & Lo, 2021). Subjek keadilan pun menjadi titik krusial yang diperdebatkan, apakah fokus diberikan kepada buruh industri terdampak, komunitas lokal, negara-negara *Global South*, masyarakat adat, atau generasi mendatang (Rioux-Gobeil & Thomassin, 2024). Perdebatan juga menyentuh apakah berbagai istilah—*energy justice*, *climate justice*, *energy democracy*, *just transition*—perlu disatukan di bawah satu payung demi kejelasan politik, atau justru dipertahankan diferensiasinya karena mengandung kritik dan agenda normatif yang berbeda.

Spektrum pemaknaan JET ini dapat dibagi menjadi dua kutub besar. Satu kutub melihat JET sebagai perluasan gradual tata kelola transisi rendah karbon melalui integrasi keadilan distribusi, prosedural, dan pengakuan dalam kebijakan energi. Pendekatan ini sering berangkat dari konteks *Global North*, klaster industri, atau mekanisme finansial seperti *Just Transition Mechanism* Uni Eropa (Siciliano et al., 2021; Upham et al., 2022). Di sini, JET diposisikan sebagai kerangka kebijakan “*whole-systems*” untuk mengurangi ketimpangan tanpa secara terbuka mengguncang logika kapitalisme global (Healy & Barry, 2017). Sebaliknya, kutub lain yang berakar pada ekonomi politik dan ekologi politik mempersoalkan relasi kekuasaan global, kolonialitas, dan ekstraktivisme yang menopang transisi hijau. Perspektif ini lebih menekankan konteks *Global South*, hak masyarakat adat, dan tantangan di bawah rezim otoriter, serta menyerukan pendekatan pascakolonial, emansipatoris, dan demokratis yang lebih radikal (Broto et al., 2018). Derajat perubahan yang diusulkan pun sangat kontras, antara adaptasi infrastruktur yang sekadar “adil” (*fair*) dibandingkan dengan transformasi sistemik yang melampaui logika ekstraktivisme dan neoliberalisme (Sovacool et al., 2019).

Beberapa upaya *systematic review* telah dilakukan untuk memetakan *landscape* literatur JET, namun perdebatan ini masih menunjukkan adanya ketimpangan sudut pandang. McCauley et al. (2019) melakukan *review interdisciplinary* yang mengidentifikasi tema-tema kunci seperti *distributional inequities*, *procedural exclusions*, dan *recognition injustices* dalam sistem energi global. Sementara itu, Sovacool et al. (2017) memperluas cakupan analisis melalui pendekatan sistem menyeluruh yang menyentuh dimensi temporal, spasial, teknologi, dan dinamika sosial-politik. Meskipun demikian, Jenkins et al. (2016) menemukan bahwa literatur *energy justice* masih didominasi oleh kasus dari *Global North*, yang menggarisbawahi adanya asimetri epistemik yang ironis mengingat *Global South* justru paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Diskusi mengenai evolusi dari *environmental justice* menuju *climate justice* oleh Schlosberg & Collins (2014) memberikan fondasi teoretis yang kuat, namun Roberts & Parks (2005) memberikan kritik lebih tajam bahwa ketimpangan global berakar pada struktur relasi Utara-Selatan dan warisan kolonialisme yang belum tuntas dibahas dalam diskursus JET arus utama.

Perbedaan fokus antar peneliti ini menunjukkan bahwa produksi pengetahuan tentang JET belum sepenuhnya netral. Kritik yang muncul dari perspektif *Global South* seringkali terpinggirkan oleh narasi teknokratis negara-negara maju yang lebih mengutamakan efisiensi pasar daripada keadilan historis. Sebagai contoh, mekanisme pendanaan transisi energi sering kali dibebankan pada skema pinjaman yang justru berpotensi menambah beban utang negara berkembang, menciptakan bentuk ketergantungan baru dalam politik internasional. Oleh karena itu, JET bukan sekadar masalah teknis atau ekonomi domestik, melainkan medan pertempuran ideologis dan politis yang melibatkan kedaulatan negara dan keadilan distributif global.

Meskipun kontribusi dari berbagai literatur di atas sangat signifikan, belum terdapat upaya sistematis untuk memetakan perdebatan JET secara spesifik dari perspektif Hubungan Internasional (HI). Padahal, JET pada dasarnya merupakan fenomena transnasional yang melibatkan dinamika kekuasaan, negosiasi institusional, dan politik Utara-Selatan yang menjadi perhatian utama dalam studi HI (Ciplet et al., 2015). Tinjauan yang ada saat ini cenderung bersifat deskriptif-tematik dan belum memberikan fokus telaah kritis terhadap bagaimana dominasi perspektif *Global North* memengaruhi arah kebijakan transisi energi global. Terdapat kekosongan literatur dalam menjelaskan bagaimana norma keadilan internasional berbenturan dengan kepentingan nasional dan persaingan kekuatan besar dalam mengejar hegemoni teknologi hijau.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan sistematis terhadap literatur *Just Energy Transition* melalui kacamata Hubungan Internasional. Fokus utama diarahkan pada identifikasi tema-tema dominan, kontestasi konseptual, serta asimetri produksi pengetahuan antara *Global North* dan *Global South*. Melalui analisis ini, diharapkan posisi teoretis dan celah penelitian di masa depan dapat dipetakan secara lebih jelas, sehingga kontribusi akademik HI dalam diskursus transisi energi dapat diperkuat secara substantif. Secara khusus, tulisan ini berupaya menjawab tantangan keadilan global dalam transisi menuju energi bersih di tengah struktur internasional yang masih timpang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *qualitative document analysis* sebagai metode utama. Menurut Bowen (2009), analisis dokumen merupakan prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen, baik cetak maupun elektronik, yang memungkinkan peneliti mengekstraksi, menganalisis, dan mensintesis data dari berbagai sumber tekstual. Metode ini dipilih karena memungkinkan akses terhadap korpus literatur luas tanpa keterbatasan geografis atau temporal, mengurangi bias reaktivitas yang sering terjadi dalam wawancara atau survei, serta sesuai untuk memetakan perdebatan konseptual yang masih berkembang (Morgan, 2022). Penelitian ini mengadopsi perspektif epistemologis *constructivist-interpretivist* yang mengakui bahwa makna dalam teks merupakan hasil interpretasi yang dipengaruhi oleh posisi peneliti.

Strategi Sampling dan Pencarian Literatur.

Pemilihan literatur dilakukan melalui *purposive sampling* secara iteratif hingga mencapai *theoretical saturation*. Pencarian sistematis dijalankan pada pangkalan data Scopus, Web of

Science, dan Google Scholar dengan kombinasi kata kunci: ("*Just Energy Transition*" OR "*Just Transition*") AND ("*International Relations*" OR "*Global South*"). Kriteria inklusi dibatasi pada publikasi *peer-reviewed* (artikel jurnal, buku, *book chapters*) periode 1995-2025 yang berfokus pada JET, *energy justice*, atau *climate justice*. Penekanan khusus diberikan pada literatur pasca-2015 guna menangkap dinamika pasca-Paris Agreement. Sementara itu, kriteria eksklusi diterapkan pada *gray literature* (*policy briefs*, *working papers*), penyebutan JET yang hanya bersifat tangensial, serta duplikasi argumen. Proses ini dilengkapi dengan teknik *snowballing* untuk memastikan cakupan literatur yang komprehensif dari perspektif *Global North* dan *Global South*.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan *reflexive thematic analysis* (Braun & Clarke, 2006) yang diadaptasi untuk analisis dokumen oleh Morgan (2022). Proses analisis dilakukan melalui enam tahap: *familiarization* melalui pembacaan berulang, *coding* untuk mengidentifikasi unit-unit makna secara induktif, *theme generation* yang mengelompokkan kode ke dalam kategori lebih luas, *theme refinement* yang mengevaluasi *internal homogeneity* dan *external heterogeneity*, *defining and naming themes*, serta *writing up* berupa sintesis naratif. Kualitas penelitian dijamin melalui empat kriteria *trustworthiness* (Bowen, 2009), yaitu *credibility* melalui *source triangulation* dan *negative case analysis*, *transferability* melalui *thick description*, *dependability* melalui *audit trail*, dan *confirmability* melalui pernyataan posisionalitas eksplisit.

Klasifikasi Literatur

Berdasarkan proses *purposive sampling* dan *iterative coding*, literatur yang dianalisis diklasifikasikan ke dalam empat tema utama. Dasar pengelompokan ini ditentukan melalui kesamaan fokus analisis, unit kajian, serta kontribusi konseptual terhadap pertanyaan penelitian mengenai dinamika JET dalam skala internasional. Setiap kategori merepresentasikan sudut pandang teoretis yang berbeda dalam memandang keadilan transisi energi, mulai dari level tata kelola global hingga implementasi kebijakan pembangunan. Hasil pemetaan literatur tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pemetaan Literatur

No.	Tema/Kategori	Literatur
1	Ekonomi Politik Internasional & Tata Kelola Global	Newell & Mulvaney (2013), Newell et al. (2023), Banerjee (2024), Alsayegh (2024)
2	Ekologi Politik & Keadilan Energi	Sovacool (2021), Sovacool et al. (2017), Boateng et al. (2023), Healy & Barry (2017)
3	Demokrasi Energi & Transisi Sosio-Teknis	Burke & Stephens (2018), Karimi & Rodi (2022), Goddard & Farrelly (2018), Korsnes et al. (2023)
4	Kebijakan Publik & Studi Pembangunan	Ayas et al. (2025), Heffron et al. (2024), Cheng et al. (2023), Siciliano et al. (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tema 1: Ekonomi Politik Internasional dan Tata Kelola Global

Tema pertama berfokus pada bagaimana struktur ekonomi politik global dan institusi internasional membentuk lintasan transisi energi. Newell & Mulvaney (2013) berargumen bahwa

just transition tidak dapat dipahami terlepas dari ekonomi politik kapitalisme. Mereka mengkritik kecenderungan depolitisasi dalam diskursus transisi energi yang menyamarkan konflik kelas dan relasi kekuasaan. Konsepsi liberal menekankan kompensasi individual dan mekanisme pasar, sedangkan konsepsi radikal menuntut transformasi struktural dalam kepemilikan dan kontrol atas sarana produksi energi. Newell & Mulvaney mengidentifikasi tiga taktik industri bahan bakar fosil: membingkai hak pekerja secara instrumental untuk membenarkan kelanjutan ekstraksi, melakukan lobi untuk subsidi publik yang menguntungkan perusahaan *incumbent*, serta mempromosikan solusi teknologi seperti *carbon capture and storage* yang memungkinkan kelanjutan model bisnis lama.

Dari perspektif postkolonial, Banerjee (2024) mengkritik bagaimana diskursus transisi energi mereproduksi logika kolonial melalui *green extractivism*, yaitu ekstraksi mineral kritis dari *Global South* untuk mendukung infrastruktur energi terbarukan di *Global North*. Alsayegh (2024) menyoroti tiga hambatan struktural: disparitas sosial-ekonomi yang menghasilkan perbedaan prioritas antara dekarbonisasi cepat dan pengentasan kemiskinan, kompetisi geopolitik dalam rantai pasok mineral kritis, serta ketidakstabilan komitmen lingkungan negara-negara maju.

Tema 2: Ekologi Politik dan Keadilan Energi

Tema kedua mengintegrasikan ekologi politik dengan kerangka *energy justice*. Sovacool (2021) mengidentifikasi berbagai kelompok yang menjadi korban transisi energi rendah karbon: pekerja sektor bahan bakar fosil yang kehilangan pekerjaan, komunitas adat yang tergusur oleh proyek energi terbarukan, konsumen berpenghasilan rendah yang menghadapi kenaikan harga energi, serta petani kecil yang terdampak pengambilalihan lahan. Sovacool et al. (2017) memperluas batas konseptual *energy justice* melalui lima dimensi: pendekatan sistem menyeluruh, dimensi temporal yang mempertimbangkan keadilan antargenerasi, dimensi spasial yang menghubungkan ketidakadilan lokal dengan struktur global, dimensi teknologi yang mempertanyakan netralitas teknologi, serta dinamika sosial-politik.

Boateng et al. (2023) mengungkapkan bahwa transisi energi sering bersifat buta gender, mengabaikan perbedaan akses, kerentanan, dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Healy & Barry (2017) menganalisis gerakan divestasi bahan bakar fosil sebagai arena kontestasi, menunjukkan bahwa kampanye divestasi perlu disertai agenda positif yang mencakup pelatihan ulang, diversifikasi ekonomi, dan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak.

Tema 3: Demokrasi Energi dan Transisi Sosio-Teknis

Tema ketiga menekankan pentingnya partisipasi demokratis dalam tata kelola transisi energi. Burke & Stephens (2018) mengidentifikasi tiga model transisi: *market-led transitions* yang didominasi korporasi, *state-led transitions* dengan peran direktif pemerintah, dan *community-led transitions* yang menekankan kepemilikan lokal dan model koperasi. Karimi & Rodi (2022) mengembangkan tiga pilar *energy democracy*: demokrasi kepemilikan, demokrasi partisipatif, dan keadilan prosedural. Goddard & Farrelly (2018) menunjukkan bahwa pencapaian hasil dan proses yang adil sering melibatkan ketegangan, terutama antara dorongan menurunkan emisi secara cepat dan konsultasi yang inklusif. Korsnes et al. (2023) memperlihatkan bahwa makna keadilan sangat bervariasi tergantung konteks nasional, budaya politik, dan pengalaman historis.

Tema 4: Kebijakan Publik dan Studi Pembangunan

Tema keempat berfokus pada implementasi konkret. Ayas et al. (2025) mengevaluasi Just Energy Transition Partnerships di Indonesia dan Vietnam, menemukan kemajuan parsial pada

dimensi governance, systemic, dan socio-economic, namun kesenjangan signifikan pada dimensi financing. Di Indonesia, meskipun terdapat rencana penghentian dini 9,2 GW kapasitas batu bara pada 2030, masih terdapat 9,4 GW kapasitas baru yang sedang dibangun. Heffron et al. (2024) mengembangkan Just Energy Investment Index berdasarkan lima prinsip keadilan energi untuk sepuluh negara ASEAN. Cheng et al. (2023) mengevaluasi kepuasan kebijakan JET di Tiongkok, menunjukkan tingkat kepuasan keseluruhan hanya 0,404, dengan dimensi kompensasi material terendah. Siciliano et al. (2021) mengungkapkan kesenjangan antara prioritas komunitas lokal yang menekankan konservasi dan akses sumber daya dengan prioritas institusional yang menekankan keamanan energi nasional.

Sintesis Lintas Tema

Analisis mengungkapkan tiga pola lintas tema. Pertama, terdapat ketegangan antara urgensi dan inklusivitas, di mana kebutuhan dekarbonisasi cepat sering menjadi justifikasi mengabaikan proses partisipatif (Goddard & Farrelly, 2018, Korsnes et al., 2023). Kedua, terdapat asimetri persisten antara Global North dan Global South dalam kekuasaan, sumber daya, dan otoritas epistemik, meskipun retorika JET menekankan keadilan (Alsayegh, 2024, Banerjee, 2024). Ketiga, batasan mengenai apa yang dimaknai sebagai "keadilan" itu sendiri bersifat diperdebatkan dan inheren politis (Burke & Stephens, 2018, Sovacool, 2021).

Kontestasi 1: Reformasi versus Transformasi Struktural

Kontestasi paling mendasar berkaitan dengan sejauh mana perubahan sistemik diperlukan. Literatur energy justice yang diwakili McCauley et al. (2019), Heffron et al. (2024), dan Sovacool et al. (2017) cenderung mengadopsi posisi reformis yang menerima struktur ekonomi politik yang ada dan berfokus pada mitigasi ketimpangan distribusi, eksklusivitas prosedural, dan ketidakadilan pengakuan. Sebaliknya, perspektif transformatif dari Newell & Mulvaney (2013) dan Banerjee (2024) berpendapat bahwa reformasi inkremental tidak memadai karena akar krisis terletak pada logika kapitalisme itu sendiri. Kontestasi ini mencerminkan perdebatan antara problem-solving theory dan critical theory sebagaimana dikemukakan Robert Cox (1981).

Kontestasi 2: Universalisme versus Partikularisme Normatif

Kontestasi ini beresonansi dengan perdebatan antara kosmopolitanisme dan komunitarianisme dalam teori keadilan global. Pogge (2005) berargumen bahwa tatanan institusional global secara sistematis melanggar hak masyarakat miskin melalui mekanisme struktural yang menguntungkan negara-negara kaya, sehingga prinsip keadilan harus bersifat universal. Sebaliknya, Nagel (2005) mengajukan bahwa keadilan adalah konsep inheren politis yang hanya berlaku dalam konteks institusi koersif bersama. Bukti empiris dari Siciliano et al. (2021) menunjukkan bahwa kerangka prosedural universal yang diterapkan donor internasional di Vietnam tidak memadai karena tidak mencerminkan nilai komunitas lokal seperti perlindungan tanah leluhur dan keberlanjutan mata pencaharian tradisional. Namun partikularisme yang terlalu ketat juga problematik karena menutup kemungkinan mengkritik struktur global yang merugikan (Alsayegh, 2024, Banerjee, 2024).

Kontestasi 3: Kecepatan versus Inklusivitas

Kontestasi ketiga menyangkut ketegangan antara urgensi aksi iklim dan kebutuhan partisipasi inklusif. Goddard & Farrelly (2018) menunjukkan bahwa pencapaian hasil dan proses yang adil sering melibatkan pertukaran kontekstual. Pendekatan yang terlalu menekankan kecepatan berisiko mengabaikan keadilan prosedural dan memicu resistensi sosial. Kebijakan

yang tidak memperhatikan partisipasi dan kepentingan kelompok rentan sering menghadapi hambatan implementasi. Dilema ini bukan persoalan teknokratis, melainkan persoalan politik mengenai legitimasi dan distribusi kekuasaan.

Kontestasi 4: Asimetri Epistemik Global North-South

Kontestasi keempat berkaitan dengan politik produksi pengetahuan tentang JET. Literatur *energy justice* masih didominasi oleh studi dari *Global North*, menciptakan asimetri epistemik dalam mendefinisikan konsep keadilan dan standar evaluasi kebijakan. Kritik postkolonial menyoroti bahwa diskursus transisi energi sering berakar pada tradisi filosofis Barat dan kurang merepresentasikan konsepsi lokal. Asimetri ini juga tampak dalam mekanisme pembiayaan internasional di mana *Global North* memiliki kapasitas lebih besar menentukan parameter keberhasilan transisi.

Sintesis Kontestasi

Keempat kontestasi saling berkaitan secara *nested*. Asimetri epistemik memengaruhi penerapan prinsip universal. Prinsip universal dapat memperkuat pendekatan reformis yang mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Pendekatan tersebut sering dibenarkan atas nama urgensi. Analisis ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam JET bersifat politis dan diperdebatkan, tidak terdapat definisi teknis yang netral untuk menyelesaikan perbedaan normatif tersebut. JET perlu dipahami sebagai arena perjuangan politik global yang melibatkan pertanyaan mendasar tentang kekuasaan, legitimasi, dan transformasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini memetakan perdebatan *Just Energy Transition* dalam literatur Hubungan Internasional dan mengidentifikasi empat tema utama yang menstrukturkan diskursus tersebut: Ekonomi Politik Internasional dan Tata Kelola Global, Ekologi Politik dan Keadilan Energi, Demokrasi Energi dan Transisi Sosio-Teknis, serta Kebijakan Publik dan Studi Pembangunan. Interaksi antarkeempat tema melahirkan empat kontestasi fundamental, yaitu reformasi versus transformasi struktural, universalisme versus partikularisme normatif, kecepatan versus inklusivitas, serta asimetri epistemik *Global North-South*. Temuan ini menunjukkan bahwa JET dalam perspektif HI bukan sekadar persoalan desain kebijakan energi, melainkan arena kontestasi politik global yang merefleksikan perbedaan ontologis dan epistemologis mengenai keadilan, kekuasaan, dan transformasi tatanan dunia.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menyediakan kerangka konseptual untuk memahami JET sebagai medan perdebatan teoretis yang terstruktur dari lensa Hubungan Internasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris yang menguji kontestasi-kontestasi tersebut dalam konteks spesifik, memperkuat perspektif *Global South* melalui pendekatan dekolonial dan *participatory action research*, serta mengembangkan dialog lintas disiplin yang lebih integratif antara studi Hubungan Internasional, studi energi, dan ekologi politik. Keterbatasan penelitian ini sebagai analisis dokumen juga menunjukkan perlunya penelitian yang dapat menangkap pengalaman hidup komunitas terdampak transisi energi secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Alsayegh, O. (2024). The Struggle for a Just Energy Transition in a Turbulent World Order. Working Paper, 1-23. <https://doi.org/10.25613/8X82-0J66>

- Ayas, C., Vo, N., Khuat, B., Hu, D., Giwangkara, J., Dolan, M., & Nguyen, T. (2025). Building blocks for a successful just energy transition: A stocktake analysis of Indonesia and Vietnam. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1511(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1511/1/012010>
- Banerjee, A. (2024). Transforming the rhetoric of Just Energy Transition Partnerships into reality: The devil lies in the details. *PLOS Sustainability and Transformation*, 3(8), e0000121. <https://doi.org/10.1371/journal.pstr.0000121>
- Boateng, D., Bloomer, J., & Morrissey, J. (2023). Where the power lies: Developing a political ecology framework for just energy transition. *Geography Compass*, 17(6).
<https://doi.org/10.1111/gec3.12689>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Broto, V. C., Baptista, I., Kirshner, J., Smith, S., & Alves, S. N. (2018). Energy justice and sustainability transitions in Mozambique. *Applied Energy*, 228, 645–655.
<https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.06.057>
- Burke, M. J., & Stephens, J. C. (2018). Political power and renewable energy futures: A critical review. *Energy Research and Social Science*, 35, 78-93.
<https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.10.018>
- Cheng, H., Dong, M., & Zhou, C. (2023). Satisfaction evaluation of a just energy transition policy: evidence from China. *Frontiers in Environmental Science*, 11.
<https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1244416>
- Chiara, G., Terrana, I., Sarrica, M., & Brondi, S. (2025). What does “just” mean in just energy transitions? Different perspectives between EU institutional debates and scientific literature. *Frontiers in Political Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1572855>
- Ciplet, D., Roberts, J. T., & Khan, M. R. (2015). *Power in a Warming World: The New Global Politics of Climate Change and the Remaking of Environmental Inequality*. MIT Press.
- Cox, R. W. (1981). Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory. *Millennium: Journal of International Studies*, 10(2), 126–155.
<https://doi.org/10.1177/03058298810100020501>
- Goddard, G., & Farrelly, M. A. (2018). Just transition management: Balancing just outcomes with just processes in Australian renewable energy transitions. *Applied Energy*, 225, 110–123.
<https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.05.025>
- Healy, N., & Barry, J. (2017). Politicizing energy justice and energy system transitions: Fossil fuel divestment and a “just transition.” *Energy Policy*, 108, 451–459.
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.06.014>
- Healy, N., & Barry, J. (2017). Politicizing energy justice and energy system transitions: Fossil fuel divestment and a “just transition.” *Energy Policy*, 108, 451–459.
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.06.014>

- Heffron, R. J., Merdekawati, M., Suryadi, B., & Yurnaidi, Z. (2024). Defining a 'Just Energy Investment' for the ASEAN Just Transition. *Environmental and Sustainability Indicators*, 22, 100367. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2024.100367>
- Jenkins, K., McCauley, D., Heffron, R., Stephan, H., & Rehner, R. (2016). Energy justice: A conceptual review. *Energy Research & Social Science*, 11, 174–182. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004>
- Karimi, F., & Rodi, M. (2022). *Energy Transition in the Baltic Sea Region*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032003092>
- Korsnes, M., Loewen, B., Dale, R. F., Steen, M., & Skjølsvold, T. M. (2023). Paradoxes of Norway's energy transition: controversies and justice. *Climate Policy*, 23(9), 1132–1150. <https://doi.org/10.1080/14693062.2023.2169238>
- McCauley, D., Ramasar, V., Heffron, R. J., Sovacool, B. K., Mebratu, D., & Mundaca, L. (2019). Energy justice in the transition to low carbon energy systems: Exploring key themes in interdisciplinary research. *Applied Energy*, 233–234, 916–921. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.10.005>
- Morgan, H. (2022). Conducting a Qualitative Document Analysis. *Qualitative Report*, 27(1), 64–77. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- Nagel, T. (2005). The Problem of Global Justice. *Philosophy & Public Affairs*, 33(2), 113–147. <https://doi.org/10.1111/j.1088-4963.2005.00027.x>
- Newell, P., & Mulvaney, D. (2013). The political economy of the "just transition." *Geographical Journal*, 179(2), 132–140. <https://doi.org/10.1111/geoj.12008>
- Newell, P., Daley, F., Mikheeva, O., & Peša, I. (2023). Mind the gap: The global governance of just transitions. *Global Policy*, 14(3), 425–437. <https://doi.org/10.1111/17585899.13236>
- Pogge, T. (2005). World Poverty and Human Rights. *Ethics & International Affairs*, 19(1), 1–7. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2005.tb00484.x>
- Rioux-Gobeil, F., & Thomassin, A. (2024). A just energy transition for Indigenous peoples: From ideal deliberation to fairness in Canada and Australia. *Energy Research & Social Science*, 114, 103593. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103593>
- Roberts, J. T., & Parks, B. (2005). *A Climate of Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate Policy*. MIT Press.
- Schlosberg, D., & Collins, L. B. (2014). From environmental to climate justice: Climate change and the discourse of environmental justice. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 5(3), 359–374. <https://doi.org/10.1002/wcc.275>
- Shangguan, C., Shangguan, Z., & Sun, W. (2024). Impact assessment framework of just energy transition: based on the justice principles. *Frontiers in Environmental Science*, 12. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1491946>
- Siciliano, G., Wallbott, L., Urban, F., Dang, A. N., & Lederer, M. (2021). Low-carbon energy, sustainable development, and justice: Towards a just energy transition for the society and the environment. *Sustainable Development*, 29(6), 1049–1061. <https://doi.org/10.1002/sd.2193>

- Siciliano, G., Wallbott, L., Urban, F., Dang, A. N., & Lederer, M. (2021). Low-carbon energy, sustainable development, and justice: Towards a just energy transition for the society and the environment. *Sustainable Development*, 29(6), 1049–1061. <https://doi.org/10.1002/sd.2193>
- Sovacool, B. K. (2021). Who are the victims of low-carbon transitions? Towards a political ecology of climate change mitigation. *Energy Research and Social Science*, 73, 101916. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.101916>
- Sovacool, B. K., Burke, M., Baker, L., Kotikalapudi, C. K., & Wlokas, H. (2017). New frontiers and conceptual frameworks for energy justice. *Energy Policy*, 105, 677–691. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.005>
- Sovacool, B.K., Martiskainen, M., Hook, A. *et al.* Decarbonization and its discontents: a critical energy justice perspective on four low-carbon transitions. *Climatic Change* **155**, 581–619 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10584-019-02521-7>
- Sultana, F. (2022). Critical climate justice. *Geographical Journal*, 188(1), 118–124. <https://doi.org/10.1111/geoj.12417>
- UNFCCC. (2015). Paris Agreement. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
- Upham, P., Sovacool, B., & Ghosh, B. (2022). Just transitions for industrial decarbonisation: A framework for innovation, participation, and justice. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 167, 112699. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112699>
- Wang, X., & Lo, K. (2021). Just transition: A conceptual review. *Energy Research & Social Science*, 82, 102291. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102291>